Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No.10 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KUALITAS APLIKASI E-KINERJA PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dhika Kusuma Putri[1], Abdul Rahman[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLEINFO

Article history:
Received: March 2026
Revised: March 2026
Accepted: March 2026
Available online: March 2026

Korespondensi: Email:
dhikaputri11@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

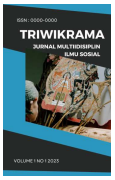
Abstrak

Penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan yang dikenal sebagai e-Government, menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menerapkan e-Government adalah pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis digital atau e-Kinerja, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipi Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas aplikasi e-Kinerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Kualitas e-Government oleh (Yang et al., 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aplikasi e-Kinerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI telah berjalan cukup baik pada dimensi kegunaan isi, kecukupan informasi, dan privasi/keamanan yang tercermin dari kelengkapan data kinerja, dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas penilaian kinerja pegawai, serta penerapan Multi Factor Authentication (MFA). Namun, dalam pelaksanaanya masih menghadapi sejumlah tantangan pada dimensi kegunaan, aksesibilitas, dan interaksi, yang tercermin dari adaptasi pegawai terhadap pembaruan sistem, pelatihan yang belum interaktif, serta kendala akses saat trafik tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas server, serta pendekatan metode pelatihan yang lebih interaktif agar pemanfaatan aplikasi e-Kinerja lebih optimal.

Kata Kunci: Kualitas; E-Kinerja; Penilaian Kinerja

Abstract

The implementation of information technology in the public sector, known as e-Government, has become the main focus of the Indonesian government in improving the quality of public services and governance. One of the government's initiatives in implementing e-Government is the development of a digital performance appraisal system, known as e-Kinerja, which aims to enhance accountability and work efficiency Civil Servants (ASN). This research employs a qualitative method with a descriptive approach and is analyzed using the e-Government quality theory proposed by Yang et al. (2005). The results indicate that the quality of the e-Kinerja application at Setjen DPR RI has generally performed well in the dimensions of content usefulness and information adequacy, and privacy/security, as reflected in the completeness of performance data, support for transparency and accountability in employee performance appraisal, and the implementation of Multi Factor Authentication (MFA).



However, several challenges remain in the dimensions of usability, accessibility, and interaction, as indicated by employes adaptation to system updates, the lack of interactive training, and access constraints during periods of high traffic. Therefore, continuous assistance, increased server capacity, and more interactive training approaches are required to optimize the utilization of the e-Kinerja application.
***Keywords**: Quality; E-Kinerja; Performance Appraisal*

PENDAHULUAN

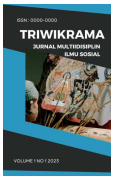
Kinerja adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan organisasi atau perusahaan, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kinerja merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi atau instansi perusahaan (Herlambang, 2023). Menurut (Amalia et al., 2024) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan, namun sebaliknya kinerja yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam organisasi, bagaimana pencapaian tujuan organisasi yang efektif melalui kinerja yang baik (Rahayu et al., 2024).

Menurut (Lembong et al., 2021), kinerja pegawai yang diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung dalam berjalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh (Kencono et al., 2024), era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teknologi informasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di berbagai sektor, termasuk di lingkungan pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan yang dikenal sebagai *e-Government*, telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. *E-Government* diciptakan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat di satu sisi, dan untuk membangun model tata kelola baru yang akan memberdayakan individu, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan lainnya (Hashim, 2024).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pengembangan e-Government merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menerapkan e-Government adalah pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis digital atau yang disebut dengan e-Kinerja, yang berfokus dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai salah satu abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk menjadi pioner di segala bidang, mempunyai kualitas, berdedikasi, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Sakarina & Noviantoro, 2024).

Aplikasi E-Kinerja merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dirancang untuk mengelola dan menilai kinerja ASN secara lebih efisien dan transparan. Dengan adanya e-Kinerja, pemerintah dapat memantau perilaku dan kinerja pegawai setiap harinya dengan lebih mudah mulai dari identitas pegawai, catatan aktivitas harian, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, dan tim kerja pegawai. Aplikasi ini dikembangkan untuk memfasilitasi pegawai ketika menginput tugas yang dibebankan, membuat, serta menyusun laporan kerja harian, bulanan, dan tahunan. Selain itu,



aplikasi ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi pimpinan/atasan dalam membuat keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja. E-Kinerja juga dapat digunakan untuk Kenaikan Pangkat, Mutasi Kepegawaian, Pensiun, serta Pindah Instansi.

Penerapan aplikasi e-Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui sistem pengelolaan kinerja yang terukur, transparan, dan berbasis digital. Dengan e-Kinerja, setiap proses mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga memudahkan monitoring capaian kinerja, memperkuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan adanya data kinerja yang tercatat dengan baik dan sistematis, maka dapat dibuat keputusan yang lebih tepat dan strategis terkait dengan penugasan, pelatihan, dan pengembangan pegawai ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI. Selain itu, aplikasi tersebut juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai institusi yang profesional dan modern.

Namun, seperti banyak inovasi, adopsi, dan implementasi teknologi baru sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan terkait pelaksanaan e-Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Permasalahan tersebut diantaranya beberapa pegawai masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi informasi dan kesulitan dalam memahami penggunaan sistem tersebut.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan sistem e-Kinerja karena terdapat banyak fitur yang juga menjadi bagian permasalahan. Meskipun sistem e-Kinerja beberapa kali mengalami perbaikan dalam fiturnya, hal ini tidak selalu membantu. Ketika pegawai sudah memahami fitur yang lama, mereka harus beradaptasi lagi dengan perubahan fitur yang baru, yang justru dapat menambah kesulitan mereka. Di sisi lain, pelatihan penggunaan e-Kinerja masih kurang didukung oleh media pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami, sehingga tidak semua pegawai dapat mengoperasikan aplikasi secara optimal.

Dalam era pemerintahan modern, penerapan teknologi informasi melalui e-Government menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kualitas e-Government memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan dan efektivitas penerapan sistem digital di lingkungan birokrasi, termasuk di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Secara umum, kualitas e-Government dapat diartikan sejauh mana layanan digital pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya melalui penyediaan sistem yang mudah digunakan, informasi yang relevan dan akurat, akses yang luas dan responsif, jaminan keamanan data, serta fasilitas interaksi yang mendukung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Aplikasi e-Kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan *e-Government*, sangat bergantung pada terpenuhinya aspek-aspek kualitas tersebut. Jika aplikasi e-Kinerja mampu menghadirkan sistem yang mudah digunakan, informasi yang lengkap dan akurat, akses yang mudah, serta jaminan keamanan dan interaksi yang baik, maka pegawai akan lebih mudah beradaptasi, memahami, dan memanfaatkan aplikasi secara optimal.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No.10 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

KAJIAN TEORI

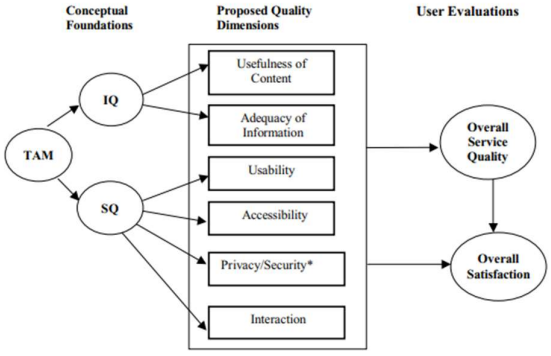
E-Government

Menurut (Fathya et al., 2024) dalam bukunya Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik *E-Government*, mengatakan bahwa *e-Government* adalah fenomena global yang melibatkan banyak pemerintah di seluruh dunia menggunakan website *e-Government* untuk menyediakan layanan kepada pemangku kepentingan mereka.

Menurut (Rachmad et al., 2024) dalam bukunya Layanan dan Tata Kelola *E-Government*: Teori, Konsep, dan Penerapan, mengatakan bahwa pengertian *e-Government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintahan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik kepada warga negara, bisnis, dan entitas lainnya. Tujuan utama dari *e-Government* adalah untuk memudahkan interaksi antara pemerintah dan *stakeholders*-nya (warga negara, bisnis, dan pemerintah lainnya), meningkatkan transparansi kegiatan pemerintah, dan mempercepat proses penyelenggaraan layanan publik.

Kualitas *e-Government* sangat mempengaruhi efektivitas penerapan sistem di lingkungan pemerintahan. Semakin baik kualitas *e-Government*, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program berbasis teknologi informasi di instansi pemerintah (Sakawati & Yamin, 2024). Kualitas *e-Government* dapat diukur melalui beberapa dimensi menurut beberapa pakar.

Menurut (Yang et al., 2005), saat ini belum terdapat landasan konseptual yang mapan untuk mengembangkan dan mengukur kualitas layanan situs Web secara umum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya mengintegrasikan beberapa metode konseptual untuk mengidentifikasi dimensi kualitas layanan yang relevan, dengan mencantumkan dasar-dasar teori dan hubungannya dengan faktor-faktor kualitas layanan.

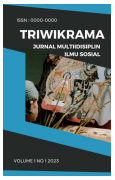


Gambar 1. Landasan Konseptual Kualitas *E-Government* menurut (Yang et al., 2005)
Sumber: (Yang et al., 2005)

E-Kinerja

E-Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memonitor kinerja pegawai secara elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengukuran kinerja pegawai di lingkungan kerja. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-Kinerja memungkinkan pengumpulan data kinerja secara *real-time*, pemantuan progres tugas, dan evaluasi kinerja yang lebih objektif (Rosalia, 2024).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No.10 Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Aplikasi E-Kinerja merupakan contoh penerapan dari teori-teori akuntansi sumber daya manusia yang terangkum dalam sebuah aplikasi berbasis web. Selain itu, e-Kinerja dapat mengukur, mengidentifikasi, menyampaikan, memberikan penilaian, serta penghargaan berupa tambahan penghasilan (Onibala et al., 2021). Untuk mampu menggunakan sistem e-Kinerja, seluruh pegawai diberikan sebuah pelatihan untuk menggunakan sistem tersebut. Pengguna akan puas menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa pelatihan yang mereka ikuti dapat membantu mereka menggunakan sistem tersebut (Nurhayati, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan pendekatan tersebut, maka data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan informasi, peristiwa, dan fenomena yang terjadi selama proses penelitian, serta kondisi sebenarnya. Penelitian ini juga berupaya menafsirkan dan menjelaskan data yang terkait dengan situasi yang sedang berlangsung. Menurut (Moleong, 2014), metode penelitian kualitatif adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.
Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif menurut (Miles et al., 2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi kualitas *e-Government* menurut (Yang et al., 2005). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi serta validitas data penelitian.

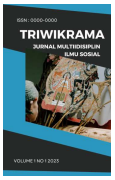
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI

1. Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI

   Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 adalah Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.
2. Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI

   Fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 yaitu:
   a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
   b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;



c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelohan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

Penyajian data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan teori Kualitas E-Government menurut (Yang et al., 2005). Teori ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan berbasis elektronik (*e-Government*) dengan memperhatikan sejumlah indikator yaitu kegunaan isi, kecukupan informasi, kegunaan, aksesibilitas, privasi/keamanan, dan interaksi. Keenam indikator inilah yang akan dibahas dalam hasil pembahasan penelitian pada tahun ini (2025), Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

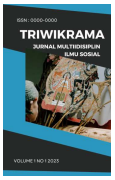
1. Kegunaan Isi

   Aplikasi e-Kinerja dianggap sudah relevan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini terlihat dari fitur-fitur yang sudah mendukung kebutuhan pegawai dalam pelaporan, penilaian, dan monitoring kinerja secara efektif dan efisien. Aplikasi e-Kinerja juga dinilai mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Dengan adanya pembaruan dan penyesuaian tersebut, aplikasi e-Kinerja tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terakhir dalam pengelolaan kinerja ASN. Hal ini mencerminkan bahwa aplikasi e-Kinerja bersifat dinamis, responsif terhadap perubahan, dan selalu berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi serta kebutuhan terkini dalam pengelolaan kinerja ASN. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar manfaat aplikasi semakin optimal.

   Penilaian perilaku kerja dalam aplikasi masih bersifat kualitatif dengan kategori seperti “Di bawah Ekspektasi”, “Sesuai Ekspektasi”, dan “Di atas Ekspektasi”, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas karena belum berbasis indikator kuantitatif. Selain itu, fleksibilitas dalam penyesuaian SKP di tengah tahun juga masih terbatas, padahal dalam praktik sering terjadi perubahan tugas atau regulasi yang tidak terakomodasi dalam SKP awal. Di sisi lain, perlu adanya fitur revisi SKP di tengah tahun yang dapat diakses oleh pegawai dan disetujui oleh atasan, sehingga setiap perubahan tugas atau regulasi dapat segera diakomodasi dalam sistem.

2. Kecukupan Informasi

   Kecukupan informasi dalam aplikasi e-Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal kelengkapan dan integrasi data pegawai. Sistem ini telah mampu menghimpun berbagai informasi penting, mulai dari data identitas pegawai, uraian tugas, target dan realisasi SKP, hingga eviden pendukung yang dapat diunggah secara langsung. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, aplikasi e-Kinerja



memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses penilaian kinerja dan memudahkan pegawai dalam menyusun SKP dan melaporkan kinerja serta memudahkan atasan dalam monitoring dan evaluasi kinerja bawahan secara *real time*.

3. Kegunaan

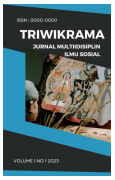
   Kegunaan aplikasi e-Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan perubahan positif dalam sistem pelaporan dan penilaian kinerja ASN. Aplikasi ini mempermudah proses input data, monitoring kinerja, serta pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Dengan digitalisasi ini, proses penilaian kinerja menjadi lebih efisien, data lebih mudah diakses, dan proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara *real time*. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini umumnya dinilai lengkap untuk mendukung pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja. Perubahan sistem pelaporan SKP menjadi setiap triwulan juga terbukti membantu pegawai dalam mengingat, mengelola, dan menyelesaikan tugas tepat waktu, sehingga pelaporan tidak lagi menumpuk di akhir tahun. Namun, proses adaptasi terhadap aplikasi masih menjadi tantangan, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi atau ketika terjadi pembaruan sistem. Meskipun pegawai masih termasuk dalam kategori usia produktif, kebutuhan akan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan ulang secara berkala tetap diperlukan agar seluruh pegawai dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal.

4. Aksesibilitas

   Aplikasi e-Kinerja sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), yang memudahkan pengelolaan data pegawai dan meningkatkan efisiensi dalam proses penilaian kinerja. Aplikasi e-Kinerja dinilai telah mengalami peningkatan signifikan dalam aksesibilitas berkat sistem yang lebih terintegrasi dan fitur yang semakin canggih. Akan tetapi, masih terdapat kendala seperti saat terjadi lonjakan trafik pada periode pengisian SKP serentak. Pada saat-saat tersebut, aplikasi sering mengalami penurunan performa, seperti akses yang lambat atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas *server* dan infrastruktur jaringan sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan trafik pada periode tertentu, sehingga tidak terjadi kendala saat banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan.

5. Privasi/Keamanan

   Privasi dan keamanan pada aplikasi e-Kinerja saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, seiring dengan penerapan berbagai fitur perlindungan data seperti *Multi Factor Authentication* (MFA) yang mewajibkan pengguna memasukkan kode verifikasi tambahan selain NIP dan *password* saat login. Langkah ini secara signifikan meningkatkan tingkat keamanan dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data pribadi serta informasi kinerja pegawai. Mengingat, serangan pada keamanan digital saat ini semakin kompleks, seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan kebocoran data. Penerapan kebijakan yang tegas terkait perlindungan data menjadi kunci dalam meminimalisasi risiko kebocoran data. Dengan kombinasi penguatan kebijakan, edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan, perlindungan privasi dan keamanan data pada aplikasi e-Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat semakin optimal dan terpercaya.



6. Interaksi

Interaksi dalam aplikasi e-Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI telah berjalan cukup efektif, terutama dalam mendukung komunikasi vertikal antara atasan dan bawahan. Fitur *feedback*, pelaporan, dan monitoring progres kerja secara *real time* telah memudahkan atasan dalam memberikan arahan, melakukan evaluasi, serta memberikan *reward and punishment* sesuai kinerja pegawai. Selain itu, aplikasi juga menyediakan pembagian fungsi dan akses berdasarkan jabatan.

Dalam aplikasi e-Kinerja, fungsi dan akses pengguna dibedakan secara jelas berdasarkan jabatan masing-masing. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) memiliki akses untuk mengisi eviden, menilai bawahan, melihat kurva penilaian, dan memberikan *feedback* perilaku rekan kerja. Sementara itu, Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Administrasi (JA) hanya dapat mengisi eviden dan memberikan *feedback* perilaku rekan kerja. Pembagian fungsi dan akses ini dirancang agar proses penilaian dan pelaporan berjalan lebih terstruktur serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan yang diembannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi e-Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pemantauan serta penilaian kinerja pegawai. Kualitas aplikasi e-Kinerja dinilai sudah cukup baik dan relevan dengan kebutuhan organisasi karena mampu menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi, sehingga mempermudah proses pelaporan, evaluasi, dan monitoring kinerja secara efektif dan efisien. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut juga telah mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja ASN, menjadikan proses penilaian kinerja ASN lebih terstruktur, terdokumentasi, dan objektif.

Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Tantangan adaptasi bagi beberapa pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi, aspek penilaian perilaku kerja yang belum sepenuhnya berbasis kuantitatif, serta keterbatasan *server* yang menyebabkan akses lambat saat digunakan secara serentak. Dengan demikian, meskipun aplikasi e-Kinerja telah memberikan dampak positif, upaya perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar manfaatnya semakin optimal dan merata di seluruh lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

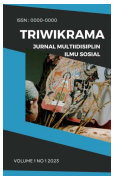
REFERENSI

Jurnal

Amalia, I., Maria, S., Herlina, H., Zaenudin, T., & Redjeki, F. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Inti Medika Sarana Bandung. *MANDIRI ECONOMICS JOURNAL*, *1*(1), 1–12.

Herlambang, M. A. T. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV Pilar Perkasa Mandiri. *Journal of Economic and Management (JECMA)*, *5*(1), 104–115.

Nurhayati, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-Kinerja dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 79–91.



Onibala, A. A., Rindengan, Y., & Lumenta, A. S. M. (2021). *Analisis Penerapan Model Utaut 2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) Terhadap E-Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*.

Rosalia, R. (2024). Pengaruh Kemampuan Kerja dan Motivasi Kerja dalam Menggunakan Aplikasi E-Kinerja (Studi Kasus pada Pegawai ASN Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir): Pengaruh Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Tenaga Medis Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis*, *1*(2).

Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal Governance and Politics (Jgp)*, *4*(1), 49–61.

Yang, Z., Cai, S., Zhou, Z., & Zhou, N. (2005). Development and Validation of an Instrument to Measure User Perceived Service Quality of Information Presenting Web Portals. *Information & Management*, *42*(4), 575–589.

Buku

Fathya, V. N., Hamdi, M. A., Rosmaya, M., Priyatno, M. B., Nursanto, G. A., Susaningsih, C., Pujonggo, S. S., Wilonotomo, W., Prawira, F. T., & Karmila, A. A. (2024). *Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik (E-Government)*.

Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, *5*(10).

Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.